

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pakistan merupakan salah satu negara berkembang di kawasan Asia Selatan dengan jumlah populasi yang cukup besar yakni 184 juta jiwa.¹ Berdasarkan data statistik yang dihimpun, Pakistan menduduki posisi kedua tertinggi di dunia sebagai negara dengan jumlah anak dan remaja yang tidak bersekolah, kondisi ini berimbas pada meledaknya angka buta huruf pada orang dewasa.² Pada tahun 2010 jumlah anak dan remaja yang tidak bersekolah mencapai angka 5.1 juta dan lebih dari 3 juta anak berjenis kelamin perempuan.³ Sedangkan secara total jumlah orang dewasa yang menyandang buta huruf mencapai 49.5 juta jiwa dengan perkiraan 2 per 3 adalah perempuan.⁴ Proses industrialisasi sedang gencar direalisasikan di Pakistan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan *Gross Domestic Product* (GDP). Namun sebagian besar dana yang dihasilkan oleh negara dialokasikan bagi keamanan nasional dan pembayaran hutang negara. Pengalokasian dana untuk pembangunan infrastruktur, kepentingan publik seperti pendidikan tidak menjadi prioritas bagi pemerintah.⁵

Pemerintahan Pakistan lebih fokus terhadap pengamanan nasional untuk menghindari bahaya dan serangan teroris. Ancaman teroris juga secara tidak langsung memperlambat peningkatan GDP karena situasi Pakistan dianggap tidak aman sehingga

¹ UNESCO, 2015. "*Pakistan Education For All: Review Report 2015*" hlm 2, dalam <http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002297/229718E.pdf> [diakses pada 2 Desember 2019]

² Tayyaba Tahir, 2016. "*Education in Pakistan*", dalam <https://dailytimes.com.pk/43406/education-in-pakistan/> [daring] diakses pada 2 Desember 2019

³ EFA GMR, 2012. "*Education in Pakistan*" hlm 1, dalam https://en.unesco.org/gem-report/sites/gem-report/files/EDUCATION_IN_PAKISTAN__A_FACT_SHEET.pdf [diakses pada 2 Desember 2019]

⁴ Ibid, hlm. 2

⁵ Stratfor, 2016. "*How National Security will Dictate Pakistan's Future*," dalam <https://worldview.stratfor.com/article/how-national-security-will-dictate-pakistans-future> [diakses pada 2 Desember 2019]

mengurangi minat investor asing untuk menanamkan modal. Hal ini berpengaruh terhadap meledaknya angka kemiskinan di Pakistan. Selanjutnya tingkat kemiskinan yang tinggi menjadi faktor utama penyebab terjadinya kesenjangan pendidikan antara anak perempuan dan laki-laki di Pakistan. Keluarga dengan kondisi perekonomian yang terbatas akan mendahulukan anak laki-laki untuk memperoleh pendidikan dibandingkan anak perempuan dengan anggapan bahwa anak laki-laki kelak akan menjadi pemimpin keluarga dan harus memiliki pengetahuan yang cukup untuk bekerja

Selain kemiskinan, kesenjangan pendidikan juga dipengaruhi oleh kualitas pendidikan gratis yang buruk di Pakistan. Struktur pendidikan di Pakistan terbagi menjadi 5 tingkatan yaitu *primary* (kelas 1 – kelas 5), *middle* (kelas 6 – kelas 8), *high* (kelas 9 – kelas 10), *intermediate* (kelas 11 – kelas 12) dan universitas.⁶ Kelima jenjang pendidikan didominasi oleh instansi pendidikan milik pemerintah dengan jumlah sekitar 180,846 atau 69% sedangkan instansi swasta tidak lebih dari 80,057 atau 31%.⁷ Meskipun instansi pendidikan pemerintah lebih mendominasi, kualitas pendidikan di Pakistan tidak kunjung membaik karena pendidikan gratis yang diberikan oleh pemerintah sangat jauh dari kelayakan seperti ketiadaan fasilitas dan ruang kelas, kurangnya tenaga pengajar berpengalaman dan materi yang tidak sesuai.⁸ Sebagian besar anak-anak Pakistan yang berasal dari keluarga kurang mampu tidak memiliki kesempatan untuk bersekolah di institusi pendidikan swasta dikarenakan biaya pendidikan yang terbilang tinggi.

Pilihan lain bagi anak kurang mampu di Pakistan untuk menerima pendidikan secara gratis adalah bersekolah di *Deeni Madaris* atau sekolah berbasis keagamaan,

⁶ US Library of Congress, t.t. “*Education*”, dalam <http://countrystudies.us/pakistan/42.htm> [diakses pada 3 Desember 2019]

⁷ Aftab Hussain, 2015. “*Education System of Pakistan: Issues, Problems and Solutions*”, dalam <http://www.ipripak.org/education-system-of-pakistan-issues-problems-and-solutions/> [diakses pada 3 Desember 2019]

⁸ UNESCO, 2015. “*Pakistan Education For All: Review Report 2015*” hlm 4, dalam <http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002297/229718E.pdf> [diakses pada 3 Desember 2019]

instansi ini cukup berperan dalam menyebarkan pendidikan dan mengatasi buta huruf.⁹ Pendanaan diperoleh dari donatur dan penggalangan dana memungkinkan *Deeni Madaris* untuk menyediakan makanan dan asrama gratis bagi siswa yang bersekolah disana. Namun jumlah *Deeni Madaris* tidak lebih dari 13.420 yang artinya hanya sebagian kecil dari jumlah instansi pendidikan yang ada di Pakistan.¹⁰ Buruknya instansi pendidikan yang dikelola oleh pemerintah menjadi faktor utama terjadinya krisis pendidikan di Pakistan. Biaya pendidikan di sekolah swasta yang terlampau tinggi dan jumlah sekolah yang terbatas sangat menghambat akses anak-anak Pakistan untuk memperoleh pendidikan dengan kualitas terbaik. Sedangkan sekolah negeri yang seharusnya menjadi harapan bagi masyarakat Pakistan justru menawarkan pendidikan dengan segala keterbatasan.

Hasil riset oleh *Pakistani Population Council* menyatakan kesenjangan pendidikan bagi perempuan tidak hanya disebabkan oleh kemiskinan.¹¹ Persoalan jarak yang disebabkan oleh persebaran sekolah yang tidak merata dan hanya terpusat di sebagian wilayah perkotaan menjadi salah satu alasan bagi orangtua di Pakistan untuk tidak menyekolahkan anak perempuan. Tindak kekerasan seksual, pemerkosaan dan penculikan yang sering terjadi di Pakistan akan sangat membahayakan keselamatan anak-anak perempuan yang melakukan perjalanan jauh menuju ke sekolah. Selain itu jarak yang teramat jauh dari rumah yang berada di pelosok desa ke sekolah yang berada di perkotaan juga membuat orangtua enggan menyekolahkan anaknya. Sebab dibutuhkan biaya transportasi yang cukup besar untuk bisa sampai ke sekolah. Hal ini disebabkan oleh

⁹ UNESCO, *Ibid*, hlm. 4

¹⁰ *Ibid*, hlm. 4

¹¹ European Union, 2013. "Girls' Education in Pakistan – Malala Yousafzai", dalam [http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2013/130677/LDM_BRI\(2013\)130677_REV1_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2013/130677/LDM_BRI(2013)130677_REV1_EN.pdf) [diakses pada 3 Desember 2019]

jumlah transportasi umum yang masih sangat terbatas di Pakistan. Sehubungan dengan tingginya biaya transportasi, masih banyak keluarga di Pakistan yang kesulitan untuk sekedar membeli makanan, seragam atau kebutuhan pokok lainnya. Maka dari itu banyak sekali orangtua yang memutuskan untuk tidak menyekolahkan anaknya.

Selain itu jumlah universitas masih sangat terbatas dibandingkan dengan jumlah populasi yang ada di Pakistan. Penyebabnya adalah kesadaran untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih dari *middle school* amat sangat kecil khususnya perempuan, di area perkotaan hanya 54% dari total anak perempuan yang bersekolah di jenjang *primary school* sedangkan di *middle school* jumlahnya menurun yaitu 30%.¹² Sedangkan di pedesaan hanya 50% anak perempuan yang bersekolah di *primary school* dan menurun drastis di *middle school* menjadi 24%. Artinya hampir setengah dari keseluruhan populasi anak perempuan di Pakistan tidak pernah menerima pendidikan sama sekali.¹³ Ketidaktahuan para orangtua atas pentingnya pendidikan bagi anak perempuan dan laki-laki menjadi faktor pendorong kesenjangan pendidikan bagi perempuan. Ditambah lagi dengan kondisi buta huruf pada orang dewasa menjadi salah satu penyebab kurangnya kesadaran atas pentingnya pendidikan bagi anak perempuan.¹⁴

Kemudian kondisi di Pakistan yang dinilai kurang aman dengan maraknya berbagai kasus penculikan dan pemerkosaan juga mendorong para orangtua untuk menikahkan anak perempuan di usia remaja. Menurut data yang dihimpun oleh UNICEF pada tahun 2016, sekitar 21% perempuan Pakistan menikah dibawah usia 18 tahun.¹⁵ Alasan lain

¹² European Union, Ibid

¹³ Ibid

¹⁴ Maliha Naveed, 2013. "Reason of Low Levels of Education in Pakistan," dalam <http://www.pakistanherald.com/articles/reasons-of-low-levels-of-education-in-pakistan-3065> [diakses pada 3 Desember 2019]

¹⁵ Girls Not Bride, t.t. "Pakistan Child Marriage," dalam <http://www.girlnotbrides.org/child-marriage/pakistan/> [diakses pada 3 Desember 2019]

yang melatarbelakangi pernikahan pada anak adalah persoalan tradisi dan budaya yang dianut. Pernikahan pada anak perempuan diusia remaja secara tidak langsung telah menghambat atau bahkan menutup akses remaja perempuan untuk memperoleh pendidikan, khususnya pendidikan formal. Meskipun aturan mengenai usia pernikahan legal telah ditetapkan yaitu 18 tahun dan penetapan sanksi atau denda bagi pelanggar, angka pernikahan dini masih sulit mengalami penurunan.

Dari sekian banyak fakta yang dihimpun keterlibatan perempuan dalam pendidikan formal tidak pernah melebihi laki-laki padahal rasio perbandingan jumlah perempuan dan laki-laki di Pakistan adalah 1,05 dan bisa dikatakan seimbang.¹⁶ Namun jumlah perempuan yang bersekolah selalu lebih rendah dari laki-laki, hal ini merupakan indikator terjadinya diskriminasi gender. Apabila dibiarkan kesenjangan pendidikan yang terjadi di Pakistan akan menjadi permasalahan sistemik yang berkepanjangan. Mulai dari tingginya perempuan penyandang buta huruf hingga tingkat produktifitas perempuan menurun sehingga berpotensi meningkatkan angka kemiskinan secara menyeluruh di Pakistan. Kemiskinan yang disebabkan oleh diskriminasi pendidikan juga menjadi lebih susah untuk dituntaskan. Mengingat pemerintah Pakistan juga tidak sepenuhnya fokus dalam pembenahan pendidikan karena adanya masalah keamanan nasional berkaitan dengan terorisme yang lebih krusial untuk ditangani.

UNESCO sebagai organisasi internasional yang terfokus dalam bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan budaya berperan untuk menindaklanjuti permasalahan yang terjadi di Pakistan yakni kesenjangan pendidikan. UNESCO mulai beroperasi di Pakistan sejak tahun 1958 yang bertempat di Karachi, setelah itu tahun 1989 kantor UNESCO

¹⁶ Todaro, M.P., dan Smith S.C., 2006. "*Pembangunan Ekonomi*". Jakarta: Erlangga

dipindahkan ke wilayah yang lebih strategis yaitu Islamabad.¹⁷ Awalnya pendirian kantor UNESCO di Pakistan dimaksudkan menjadi pusat regional bahan bacaan di kawasan Asia Selatan, akan tetapi selanjutnya keberadaan UNESCO ini juga turut menanggapi isu domestik mengenai pendidikan. Selama lebih dari 50 tahun beroperasi di Pakistan, prioritas utama UNESCO adalah memberikan pendidikan secara menyeluruh bagi warga Pakistan tanpa adanya diskriminasi gender.¹⁸ Bukan hanya itu, UNESCO bekerjasama dengan pemerintah Pakistan juga terus berupaya untuk menurunkan angka penyandang buta huruf supaya masalah pengangguran dapat dituntaskan.¹⁹

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan, maka rumusan masalah yang muncul adalah bagaimana peran UNESCO dalam mengatasi kesenjangan pendidikan di Pakistan tahun 2015-2018?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Secara Umum

Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk memberikan suatu sumbangsih ilmu pengetahuan bagi khalayak umum dan akademisi dalam bentuk karya tulis ilmiah atau penelitian ilmiah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memenuhi gelar strata 1 dalam program studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

¹⁷ UNESCO, t.t. “*UNESCO Pakistan*,” dalam <http://www.unesco.org.pk/documents/UNESCO-PAKISTAN.pdf> [diakses pada 3 Desember 2019]

¹⁸ UNESCO, Ibid.

¹⁹ Ibid

1.3.2 Secara Khusus

Berdasarkan latar belakang, secara khusus tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan menjelaskan secara argumentatif fenomena kesenjangan pendidikan di Pakistan serta dampaknya terhadap kehidupan masyarakat di Pakistan secara keseluruhan. Setelah menjabarkan dan menggambarkan masalah, penulis berusaha untuk memaparkan peran dari UNESCO dalam penanganan kesenjangan pendidikan di Pakistan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Secara Teoritis

Secara teoritik, penelitian ini bermanfaat untuk menggambarkan peranan UNESCO dalam menangani permasalahan pendidikan yang disebabkan oleh kesenjangan gender di Pakistan. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya yang serupa.

1.4.2. Secara Empiris

Manfaat penelitian ini secara umum adalah sebagai bentuk dari pada sumbangsih terhadap ilmu Hubungan Internasional. Dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan referensi bidang studi ilmu Hubungan Internasional terkait isu-isu yang ditangani oleh organisasi internasional selaku aktor non-negara.

1.5 Kerangka Pemikiran

1.5.1 Landasan Teori

1.5.1.1 *Development Assistance*

Diskursus Hubungan Internasional dewasa ini semakin berkembang dan beragam.

Beberapa abad yang lalu, satu-satunya isu yang dianggap penting untuk menjadi fokus utama dunia adalah politik keamanan setiap negara. Dari isu politik pertahanan itulah muncul perang untuk memastikan bahwa negaranya masih dapat bertahan atau *survive*. Namun seiring berjalannya waktu, isu politik pertahanan dan damai tidak lagi menjadi satu-satunya isu yang penting untuk menjadi perhatian bersama. Bukan karena isu tersebut sudah tidak penting lagi, namun karena munculnya isu-isu lain yang sebelumnya alternative saat ini dianggap menjadi penting. Saat ini, selain keamanan, isu ekonomi mulai dianggap sebagai salah satu isu yang dominan dalam Hubungan Internasional. Isu ekonomi dianggap semakin populer karena kekuatan dan kapasitasnya sebagai mitigasi dari konflik. Banyak peneliti mengatakan bahwa kemapanan secara ekonomi yang merata akan menciptakan kesejahteraan sosial. Sementara kesejahteraan sosial tersebut akan secara langsung ataupun tidak langsung berdampak kepada berkurangnya konflik domestik maupun internasional bahkan dapat mencegah terjadinya aksi-aksi terorisme.²⁰

Selain ekonomi, isu-isu yang awalnya dianggap sebagai isu marginal saat ini bertransformasi menjadi isu yang banyak dibahas di level masyarakat dan negara. Contohnya adalah isu gender, lingkungan, dan kebebasan atas segala bentuk kesenjangan. Kesenjangan sosial secara sederhana dapat didefinisikan sebagai penolakan atau pelanggaran atas hal ekonomi, sosiokultural, politik, sipil, dan hak asasi manusia kepada kelompok masyarakat tertentu berdasarkan persepsi inferioritas mereka atas masyarakat yang memunyai kekuasaan atau pengaruh lebih.²¹ Dari definisi tersebut bisa dilihat bahwa terdapat relasi kuasa antara kelompok masyarakat yang inferior dan masyarakat yang superior (mempunyai kuasa atau pengaruh lebih). Relasi ini pastinya tidak akan

²⁰ Brian Burgoon, 2006. *“On Welfare and Terror: Social Welfare Policies and Political-Economic Roots of Terrorism”*. Journal of Conflict Resolution, SAGE Publication

²¹ Barry Levy & Victor Sidel, 2006. *“Social Injustice and Public Health”*. New York: Oxford University Press

menguntungkan masyarakat inferior karena posisi mereka akan selalu kalah atas masyarakat superior.

Untuk mengatasi permasalahan kesenjangan tersebut, pemerintah nasional maupun secara kolektif banyak mendiskusikan soal kebijakan ekonomi dan sosial seperti pemberian subsidi kepada masyarakat yang tidak mampu dalam finansial, mewajibkan pajak sesuai dengan kapasitas kekayaan seseorang agar dapat tercipta subsidi silang, serta kemudahan-kemudahan lain yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang *unpreviledge*. Tapi diluar dari usaha-usaha pemerintah secara nasional, pemerintah sebenarnya dapat memanfaatkan bantuan dari sisi internasional. Bantuan dari sisi internasional yang dimaksud berasal dari 2 sumber yang berbeda. Yang pertama berasal dari bantuan langsung negara donor dan yang kedua berasal dari bantuan organisasi internasional. Bantuan dari negara donor kepada meara penerima biasanya berupa *Official Develompent Assistance* (ODA). Contoh paling populer dari ODA adalah bantuan luar negeri Amerika Serikat kepada negara-negara Eropa melalui *European Recovery Pragramme* yang dilaksanakan pada 1948-1952 paska perang dunia atas inisiasi dari *Secretary of States* U.S yaitu George C. Marshall.²² Sedangkan bantuan yang diberikan dari aktor non-negara bisa disalurkan melalui organisasi-organisasi internasional baik yang berbasis inter-governmental (IGO) maupun non-governmental (NGO) sesuai dengan fokusnya masing-masing.

Terlepas dari aktor yang memberikan, namun bantuan seperti ODA bisa dikategorikan sebagai *development assistance*. *Development assistance*, sebagaimana yang diucapkan oleh Harry Truman pada 20 Januari 1949, adalah sesuatu yang

²² Lu Jian, 2019. "*Beyond Official Development Assistance: Chinese Development Cooperation and African Agriculture*". Springer Nature: Singapore.

dimaksudkan untuk memanfaatkan revolusi teknologi dan industri mereka (mayoritas negara-negara barat) untuk perkembangan wilayah (atau negara) yang kurang berkembang.²³ *Development Assistance* terdiri dari 2 kata yang berbeda yaitu *development* yang berarti perkembangan/pengembangan dan *assistance* yang berarti bantuan. *Development assistance* memiliki nama lain seperti *international assistance*, *development aid* dan lain sebagainya. Namun terlepas dari itu semua, *development assistance* berarti sebuah teori yang menjelaskan relasi dari *the have* dan *the have not* dimana *the have* memberikan bantuan luar negeri kepada *the have not* melalui skema bantuan luar negeri.

Development assistance memiliki beberapa konsep turunan seperti *economic equality* (mencakup permasalahan kelas sosial, elit politik, kesenjangan pendidikan dan kesehatan), *dignity* sebagai manusia yang berdaulat, *greater participation* atau meningkatkan partisipasi aktor dalam memberikan bantuan demi mengurangi dependensi kepada salah satu aktor saja (biasanya dimediasi oleh IGO/NGO), *sustainability* dengan mempertimbangkan banyak factor seperti ekonomi, sosial dan lingkungan sekaligus, serta *capacity building* yang bertujuan untuk mempersiapkan masyarakat lokal untuk melanjutkan pengembangan negaranya tanpa tangan asing di masa yang akan.²⁴ Maka dari itu, dari sini bisa dilihat bahwa tujuan dari *development assistance* sebenarnya adalah untuk mencapai pengembangan masyarakat dan negara yang menyeluruh.

Berbeda dengan yang terjadi di beberapa dekade yang lalu, *development assistance* juga disebut sebagai *development cooperation* dikarenakan ia beranggapan bahwa relasi *partnership* harus muncul antara donor dan negara penerima dibandingkan dengan kondisi terdahulu yang hubungan antara donor dan negara penerima dipenuhi oleh dominasi salah

²³ John, 2014. "*The theories of international assistance*". University of Makeni.

²⁴ Levy & Sidel. Op, cit

satu pihak yang memiliki kekayaan dan keilmuan yang lebih maju.²⁵ Dari sini bisa ditarik garis perbedaan antara *development assistance* dan kolonialisme yang tujuannya hanyalah untuk mengeksploitasi dan mengekstraksi kekayaan negara lain untuk kepentingannya tanpa terlalu memperhatikan kelangsungan hidup negara koloninya tersebut.

Terdapat beberapa pra-syarat atau ciri-ciri agar suatu program bisa dikategorisasikan sebagai *development assistance*. Pra-syarat tersebut terdiri dari²⁶; 1) bertujuan untuk mendukung prioritas perkembangan nasional dan internasional, 2) tidak bertujuan untuk mendapatkan keuntungan material karena *development assistance* berbeda dengan kolonialisme seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, 3) bertujuan untuk membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi negara berkembang, dan 4) didasarkan kepada kerjasama kooperatif yang bertujuan untuk kemandirian negara berkembang di masa yang akan datang.

Meskipun *development assistance* bermaksud untuk memajukan masyarakat di negara-negara berkembang melalui program-programnya, akan tetapi *development assistance* berbeda dengan *humanitarian assistance*. *Humanitarian assistance* bersifat singkat karena posisinya hanyalah sebagai respon dari peristiwa atau bencana yang terjadi di negara tertentu sehingga tujuan utamanya adalah untuk menyelamatkan nyawa sebanyak-banyaknya.²⁷ Sementara itu, *development assistance* bersifat jangka panjang karena ia berposisi sebagai respon atas masalah sistemik yang terjadi di negara-negara berkembang sehingga penyelesaiannya tidak bisa sebentar karena harus memperhatikan semua isu perkembangan mulai dari ekonomi, sosial hingga lingkungan.²⁸

²⁵ Jose Alonso dan Jonathan Glennie, 2015. "2016 Development cooperation forum policy briefs". ECOSOC

²⁶ Ibid

²⁷ Humanitarian Coalition. 2019. "Humanitarian to Development Aid," dalam <https://www.humanitariancoalition.ca/from-humanitarian-to-development-aid> [diakses pada 8 Desember 2019]

²⁸ Ibid

Berdasarkan sumber donor dari *Development Assistance* tersebut, *Development Assistance* dapat dikategorikan kedalam 3 kelas yang berbeda. Yang pertama berasal dari negara-negara kaya, yang kedua berasal dari Organisasi Internasional Non-Pemerintah, dan yang ketiga berasal dari Yayasan Swasta.²⁹ Kategori yang pertama yaitu donor dari negara-negara kaya contohnya adalah bantuan luar negeri *Marshall Plan* Amerika Serikat kepada negara-negara Eropa dan negara dari belahan dunia yang lain paska Perang Dunia ke-2. Namun kategori pertama yaitu donor negara-negara kaya ini tidak bisa diartikan sempit. Donor negara-negara kaya tidak hanya diartikan sebagai donor yang diberikan langsung oleh negara donor kepada negara penerima melalui skema *Foreign Bilateral Aid*, namun juga bisa diartikan sebagai bantuan yang diberikan oleh negara kaya melalui IGO seperti *World Bank*, UNESCO, ataupun *Economic Cooperation and Development* (OECD) untuk selanjutnya didistribusikan kepada negara-negara penerima yang membutuhkan.

Sementara itu, donor *Development Assistance* juga berasal dari Organisasi Internasional non-Pemerintah atau NGOs seperti *Amnesti International*, *Worldwide Fund for Nature* (WWF) dan lain sebagainya. Jenis *Development Assistance* yang bersumber dari NGOs secara kuantitas terus bertumbuh baik dari segi dana yang di donorkan dan juga dari perkembangan jumlah NGOs. Bisa dilihat di Amerika Latin, Asia Selatan dan Asia Tenggara bahwa jumlah NGOs di wilayah tersebut telah tumbuh dari 200% menjadi 400% hanya dalam 3-4 tahun.³⁰ Sedangkan jika dilihat dari luas cakupan *Development Assistance* yang bisa dicapai, NGOs juga tidak kalah luas jika dibandingkan dengan donor yang berasal dari negara-negara kaya. NGOs di negara-negara utara, yang didominasi oleh negara kaya, secara faktual menjadi pemain yang besar dalam hal pemberian *Development*

²⁹ Roger Riddell, 2014. "*Does Foreign Aid Really Work?*". Australian Aid and International Development Workshop: Canberra

³⁰ K. Sinaga, 1993. "*An Assessment of the Role and Development of NGOs in Indonesia: Aiding Poor People's Movements or Becoming the 'Long Arm' of the Powerful*", Bielefeld.

*Assistance*³¹ kepada negara-negara berkembang. Bahkan 28% dana *Development Assistance* yang dimiliki oleh *US Agency International Development* (USAID) juga didistribusikan melalui NGOs tersebut.³² Hal tersebut membuktikan betapa pentingnya peran NGOs dalam perkembangan *Development Assistance*.

Sumber donor *Development Assistance* terakhir adalah melalui sector Yayasan Swasta. Sektor terakhir ini tidak hanya terbatas pada yayasan amal saja, namun juga mencakup semua sektor diluar negara dan NGO seperti korporat multinasional hingga individu. Donor dari sektor ini termasuk individu, yayasan, dan korporat multinasional telah berkontribusi sebanyak USD 5.4 Milyar di tahun 2013, yaitu sebanyak 26% dari jumlah keseluruhan kemampuan finansial internasional sektor kemanusiaan.³³

Berdasarkan definisi kategorisasi tersebut, *development assistance* yang dilakukan oleh UNESCO terhadap negara Pakistan masuk kategori pertama yaitu donor yang dilakukan oleh negara-negara kaya yang disalurkan melalui *intergovernmental organizations*. Data menyebutkan bahwa donator terbesar kepada organisasi internasional *United Nations* sebagai induk dari UNESCO adalah negara-negara kaya seperti Amerika Serikat dengan \$14.1 Milyar/tahun, *United Kingdom* dengan \$7.6 Milyar/tahun, Jepang dengan \$5.4 Milyar/tahun, Jerman dengan \$4.4 Milyar/tahun³⁴ diikuti oleh negara-negara kaya lainnya. Hal tersebut membuktikan bahwa *development assistance* yang dilakukan oleh PBB beserta UNESCO sedikit banyak merupakan distribusi dari donor negara-negara kaya.

³¹ Overseas Development Institute, 1995. "*NGOs and official donors*". ODI Briefing Note, London.

³² R Sholes & J Covey, 1996. "*Partnerships for development: USAID and PVO/NGo relationships*". INTRAC Occasional Papers Series, Number 11, Oxford.

³³ Sarah Henon & Chloe Stirk, 2015. "*Private Development Assistance*". State of Civil Society Report: Guest Essay

³⁴ John McArthur dan Krista Rasmussen, 2018. "*Who actually funds the UN and other multilaterals?*" dalam <https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2018/01/09/who-actually-funds-the-un-and-other-multilaterals/> [diakses pada 9 Desember 2019]

1.5.2.2 Teori Peranan Organisasi Internasional

Secara sederhana, Organisasi Internasional dibagi menjadi 2 kategori yaitu *Intergovernmental Organizations* (IGOs) dan *Non-Governmental Organizations* (NGOs). Perbedaan utama dari keduanya adalah bahwa IGOs tercipta dari inisiasi negara-negara yang kelak menjadi anggota dari IGOs terkait sementara NGOs berasal dari sektor individu atau swasta yang bersifat lebih fleksibel dan biasanya berjalan dalam sektor non-politis. Contoh dari IGOs adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa, NATO dan lain-lain sementara NGOs adalah Worldwide Fund for Nature (WWF), Greenpeace dan lain sebagainya. Namun disamping 2 kategori organisasi internasional tersebut, ada 1 kategori baru yang berposisi di tengah-tengah 2 kategori tersebut yaitu kategori organisasi internasional *hybrid*. Organisasi internasional *hybrid* berarti bahwa baik negara maupun aktor non-negara bisa menjadi anggota atau pihak yang membentuk organisasi tersebut.³⁵ Contoh dari organisasi internasional *hybrid* ialah *the International Criminal Police Organization* (Interpol), *the International Organization for Standardization* (ISO), *the International Telecommunications Satellite Organization* (ITSO, formerly INTELSAT), *the World Conservation Union* (IUCN), *the International Committee of the Red Cross* (ICRC), dan *the International Olympic Committee* (IOC).³⁶

Organisasi internasional terbentuk atas dasar kesamaan tujuan yang dimiliki oleh setiap anggota. Tujuan yang telah disepakati bersama akhirnya membentuk suatu fungsi tertentu yang akan dijalankan oleh organisasi internasional. Maka dalam mencapai tujuan, organisasi internasional memiliki beberapa peranan yaitu sebagai wadah untuk

³⁵ Samuel Barkin, 2006. *“International Organization: Theories and Institutions”*. New York: Palgrave Macmillan

³⁶ Ibid

menggalang kerjasama atau bahkan mengurangi intensitas konflik.³⁷ Kemudian melalui organisasi internasional, setiap anggota juga berkesempatan untuk mengadakan perundingan demi mencapai keputusan bersama yang saling menguntungkan. Selain itu organisasi internasional sebagai lembaga yang mandiri juga berkemungkinan untuk melakukan kegiatan yang diperlukan dalam menjaga stabilitas dan perdamaian dunia sesuai dengan lingkup kerjanya.

Menurut Clive Archer peranan organisasi internasional terbagi dalam tiga kategori.³⁸ Pertama, organisasi internasional berperan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan tujuan politik luar negeri masing-masing negara anggota. Biasanya hal ini lebih sering terjadi pada IGO, sebagaimana negara bergabung dalam organisasi internasional dengan tujuan untuk mencapai kepentingan nasional. Kedua, organisasi internasional juga memegang peranan sebagai arena. Terakhir, organisasi internasional sebagai aktor independen yang membuat keputusan tanpa pengaruh dari pihak luar.

Dalam peran yang pertama yaitu organisasi internasional sebagai instrument untuk mencapai tujuan politik bersama bisa dianalisis menggunakan perspektif Fungsionalisme. Tokoh fungsionalisme, David Mitrany pernah menyebutkan bahwa negara *“bind together those interests which are common, where they are common, and to the extent to which they are common.”*³⁹ Hal tersebut bisa diartikan bahwa suatu negara bisa berkelompok dengan negara lain atas dasar kebutuhan dan tujuan yang sama (*common*). Dari kebutuhan dan kepentingan yang sama yang kelak akan melahirkan kooperasi antar negara, fungsionalisme berpendapat bahwa kooperasi tersebut diwaktu yang akan datang

³⁷ Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochammad Yani, 2005. *“Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. Bandung”*: PT. Remaja Rosdakarya. Hlm 27.

³⁸ Ibid, hlm 21

³⁹ R. M. Douglas, 2004. *“The Labour Party, Nationalism, and Internationalism, 1939-1951”*. London & New York: Routledge

menciptakan suatu perilaku yang akan berpengaruh terhadap sektor lainnya seperti politik dan urusan militer, hal tersebut biasa disebut dengan *spill-over*.⁴⁰ Disinilah fungsi organisasi internasional sebagai instrument untuk mencapai kepentingan bersama karena menurut fungsionalisme organisasi internasional dibentuk atas dasar kebutuhan dan kepentingan yang sama pula.

Peran organisasi internasional yang kedua adalah sebagai arena bermaksud bahwa organisasi internasional harus mampu menjadi wadah bagi perundingan-perundingan negara atau komponen-komponen anggotanya. Adanya organisasi internasional diharapkan dapat mewujudkan kedamaian dalam hal resolusi konflik atau pembuatan kebijakan yang adil. Untuk menganalisisnya, bisa menggunakan perspektif Liberalisme Institusional. Secara sederhana, Liberalisme Institusional berpendapat bahwa untuk mencapai damai dalam skala internasional, negara haruslah bekerjasama dengan menyerahkan sebagian kedaulatan negaranya demi membentuk '*integrated communities*' untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan merespon isu-isu regional dan internasional.⁴¹ Logika dari liberalism institusional ialah bahwa semakin banyak organisasi internasional sebagai wadah yang terbentuk, maka semakin damai pula dunia.

Ada 2 alasan yang melandasi klaim tersebut. Yang pertama adalah bahwa semakin banyak organisasi internasional, maka semakin menurun pula tingkat *distrust relations* yang oleh pemikir realis dianggap sebagai penyebab dari kompleksnya resolusi konflik khususnya dalam hal pelucutan senjata dan *arms control*.⁴² *Distrust relations* menurun

⁴⁰ W. W. Norton, 2010. "Chapter 7: Intergovernmental Organizations, Nongovernmental Organizations, And International Law," dalam <https://wnorton.com/college/polisci/essentials-of-international-relations5/ch/07/summary.aspx> [diakses pada 13 Desember 2019]

⁴¹ S Lamt, 2005. "Contemporary Mainstream Approaches: Neo-Realism and Neo-Liberalism," dalam Jogn Baylius, Steve Smith, dan Patricia Owens, 2015. "The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations". New York: Oxford University Press, hlm. 213

⁴² Charles Schleicher, 1962. "International Relations: Cooperation and Conflict". Prentice-Hall

dikarenakan negara akan lebih sering bertemu dan juga di sisi lain dituntut untuk lebih transparan dalam hal politik luar negeri. Alasan kedua mengapa kedamaian akan tercapai jika organisasi internasional banyak terbentuk ialah karena adanya peningkatan globalisasi dan tindak teroris, penyelundupan narkoba dan penyakit-penyakit pandemic seperti HIV/AIDS menunjukkan bahwa negara saja tidak bisa bertindak secara unilateral mengatasi ancaman ini dan hanya melalui rezim regional dan internasional dimana kebijakan-kebijakan dapat dikoordinasikan untuk membasmi ancaman-ancaman tersebut.⁴³ Dari sini bisa dilihat signifikansi dari organisasi-organisasi internasional seperti UNESCO, UNFCCC, WHO dan lain-lain dalam mengisi kekosongan kapasitas negara untuk menetralsir ancaman.

Sementara itu peran organisasi internasional yang terakhir adalah sebagai pembuat keputusan berskala internasional sesuai dengan ekspertis dari masing-masing organisasi. Contohnya adalah World Bank membuat kebijakan tentang restrukturisasi dan bantuan ekonomi terhadap negara dunia ketiga, International Monetary Fund membuat kebijakan untuk liberalisasi pasar negara-negara yang menjadi anggotanya, UNESCO membuat kebijakan terhadap negara Pakistan melalui skema *development assistance* untuk menyelesaikan masalah kesenjangan pendidikan di negara tersebut serta masih banyak lagi contoh yang lainnya.

⁴³ Graham Allison, 2000. "The Impact of Globalization on National and International Security," dalam J Donahue dan Joseph Nye, 2000. Governance in a Globalizing World, Brookings Institution Press, Washington D.C, hlm. 84

1.6 Sintesa Pemikiran

Gambar 1.1 Sintesa Pemikiran



Sintesa pemikiran ini dimulai dari adanya masalah sistemik di Pakistan. Masalah sistemik di Pakistan sangatlah beragam mulai dari pendidikan formal yang dianggap kurang penting, masalah kemiskinan yang mengakar hingga adanya opresi terhadap wanita yang dianggap tidak perlu untuk memiliki pendidikan layak sebagaimana yang bisa dinikmati oleh laki-laki. Berangkat dari masalah sistemik tersebut, Pakistan akhirnya mengalami konflik kesenjangan dalam pendidikan yang sangat parah.

Maka dari itu mengingat bahwa kebijakan nasional Pakistan belum mampu untuk mengentaskan permasalahan sistemik dalam hal kesenjangan pendidikan tersebut, maka UNESCO sebagai organisasi internasional dengan tujuan untuk memberikan perubahan positif dalam perbaikan kultural dan pendidikan di negara-negara berkembang seperti Pakistan melakukan bantuan pengembangan kepada Pakistan. Bantuan tersebut

dilaksanakan dalam wadah *development assistance* yang bertujuan untuk mengentaskan masalah kesenjangan pendidikan di Pakistan.

1.7. Hipotesis

Pakistan mengalami kesenjangan pendidikan yang cukup parah dengan menduduki posisi kedua tertinggi di dunia sebagai negara dengan jumlah anak dan remaja yang tidak bersekolah. Akses pendidikan yang tidak merata bagi anak-anak perempuan dilatarbelakangi oleh berbagai hal seperti keterbatasan ekonomi, tingginya angka pelecehan seksual, masalah terorisme dan budaya pernikahan dini. Kemudian kesenjangan pendidikan menimbulkan permasalahan yang sangat kompleks dan berkesinambungan seperti halnya peningkatan angka buta huruf pada perempuan, penurunan angkatan kerja usia produktif dan berakhir pada meledaknya angka kemiskinan. Permasalahan kemiskinan tidak akan bisa disolusikan apabila pendidikan masih belum bisa dijangkau secara menyeluruh. UNESCO selaku organisasi internasional yang fokus dalam bidang ilmu pengetahuan, pendidikan dan budaya bekerjasama dengan pemerintah Pakistan untuk menanggulangi diskriminasi pendidikan terhadap perempuan.

1.8. Metodologi Penelitian

1.8.1 Definisi Konseptual dan Definisi Operasional

1.8.1.1 Organisasi Internasional

Menurut Teuku May Rudy, organisasi internasional didefinisikan sebagai pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara dengan didasari struktur organisasi yang

jelas.⁴⁴ Kemudian Rudy juga berpendapat bahwa dalam organisasi internasional harus menjalankan fungsi yang berkesinambungan supaya dapat mencapai tujuan yang telah disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah, maupun dengan sesama kelompok non-pemerintah di negara yang berbeda.⁴⁵ Menurut Abbot dan Snidal, organisasi internasional menjalankan peran dalam berbagai bidang yang krusial mulai dari kesehatan global bahkan sampai dengan kebijakan moneter di seluruh dunia.⁴⁶ Wolfram F. Hanrieder menjelaskan organisasi internasional sebagai sebuah perjanjian kelembagaan di antara anggota sistem internasional untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan kondisi sistemik.⁴⁷ Sehubungan dengan itu organisasi internasional juga bertujuan untuk mengakomodasi aspirasi maupun kekhawatiran para anggota atas situasi internasional yang sedang berlangsung.

Dalam penelitian ini penulis memilih *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) sebagai organisasi internasional yang bersifat fungsional dalam bidang ilmu pengetahuan, pendidikan dan budaya. UNESCO memiliki peranan yang cukup signifikan dalam mengatasi kesenjangan pendidikan di Pakistan.

1.8.1.2 Kesenjangan Pendidikan

Menurut W. James Jacob dan Donald B. Holsinger, kesenjangan pendidikan adalah penyebaran akses pendidikan yang tidak merata karena perbedaan jenis kelamin, status ekonomi, agama, ras, disabilitas dan bahasa.⁴⁸ Seorang Doktor di bidang pendidikan

⁴⁴ Teuku May Rudy, 1998. "*Administrasi dan Organisasi Internasional*". Bandung: Refika Aditama, hlm 42

⁴⁵ Ibid

⁴⁶ Abbot dan Snidal. "*Why States Act through Formal International Organizations*". *The Journal of Conflict Resolutions*, 42:1 (Februari), 1998, hlm 30.

⁴⁷ Wolfram F. Hanrieder, 1996. "*International Organizations and International System*". *The Journal of Conflict Resolutions*, 10:3, hlm 298.

⁴⁸ W. James Jacob dan Donald B. Holsinger. *Inequality in Education: a Critical Analysis*. Comparative Education Research Centre, 2009, hlm. 9.

yang berasal dari India, Dharam Singh, berpendapat bahwa kesenjangan pendidikan adalah ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan yang terbentuk secara bertahap sebagai proses yang berkelanjutan, biasanya disebabkan oleh status sosial, politik dan ekonomi.⁴⁹ Wagstaff menjelaskan bahwa kesenjangan pendidikan atau ketidaksetaraan pendidikan terhadap anak dan remaja timbul dari latar belakang orang tua yang tidak mengenal pendidikan atau bisa juga kondisi sekolah yang tidak layak.⁵⁰ Melalui ketiga definisi tersebut dengan jelas membuktikan bahwa kesenjangan pendidikan merupakan masalah sistemik yang disebabkan oleh faktor-faktor lain yang saling berkaitan.

Dalam penelitian ini kesenjangan pendidikan yang dimaksud adalah ketidakmerataan akses terhadap pendidikan untuk laki-laki dan perempuan di Pakistan. Sebagaimana hal ini berkaitan dengan diskriminasi gender, sebab laki-laki lebih didahulukan dalam memperoleh pendidikan dibandingkan dengan perempuan. Namun dibalik itu juga terdapat alasan lain yang mendasari adanya diskriminasi gender seperti perbedaan status ekonomi dan sebagainya.

1.8.2. Tipe Penelitian

Pada penyusunan skripsi ini penulis menggunakan tipe penelitian yang tergolong ke dalam tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan sebuah metode penelitian dengan melakukan pengumpulan, penyusunan dan penginterpretasian data sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Selain itu penelitian deskriptif juga bertujuan untuk menggambarkan serta menghubungkan secara sistematis fakta dan karakteristik

⁴⁹ Dharam Singh, 2011. *"Inequality in Education. International Research Journal of Management Sociology and Humanity,"* 2:2, hlm. 337.

⁵⁰ A Wagstaff, E Van Doorslaer dan N Watanabe, 2003. *"On Decomposing the Causes of Health Sector Inequalities with an Application to Malnutrition Inequalities in Vietnam"*. Journal of Econometrics, Vol. 122, hlm. 209.

objek yang diteliti dengan tepat dan akurat.⁵¹ Pemaparan informasi dengan jelas adalah hal utama yang harus dilakukan dalam penelitian deskriptif. Biasanya penelitian deskriptif juga dilengkapi dengan ilustrasi melalui gambar dan grafik untuk mempermudah proses pemaparan informasi.⁵² Maka dari itu pada penelitian ini dibutuhkan adanya ketersediaan data-data dan gambaran jelas mengenai fenomena yang terjadi.⁵³

Penulis akan menjelaskan mengenai peranan UNESCO dalam mengatasi kesenjangan pendidikan yang terjadi di Pakistan pada tahun 2015-2018 melalui penelitian deskriptif. Peran UNESCO dalam mengatasi kesenjangan pendidikan di Pakistan akan dibuktikan melalui data-data yang mengungkapkan tentang peningkatan pemerataan pendidikan dan sebagainya.

1.8.3. Jangkauan Penelitian

Jangkauan ruang dalam penelitian ini adalah *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) dan Pakistan. Adapun jangkauan waktu dari penelitian ini adalah 2015 sampai dengan 2018 yang didasarkan pada Girls Right to Education Programme (GREP). Berdasarkan kesepakatan antara pemerintah Pakistan dan UNESCO program ini dimulai pada Juli 2015 yang akan berlangsung selama tiga tahun.⁵⁴ Secara umum tujuan dari program ini adalah meningkatkan partisipasi perempuan dalam pendidikan pada sembilan provinsi yang ada di Pakistan.

⁵¹ Nasution, 1992. *Metode Reaserch*. Bandung: Jemmars. Hlm. 39.

⁵² Sudyana Nana dan Ibrahim, 1998. *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*. Bandung: Penerbit Sinar Baru. Hlm. 52.

⁵³ Ulber Silalahi, 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama. Hlm. 29

⁵⁴ UNESCO, 2018. "Girls Right to Education Programme in Pakistan," dalam http://unesco.org.pk/education/documents/grep/programme_testimonials.pdf [diakses pada 14 Desember 2019]

1.8.4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data menjadi salah satu proses yang amat penting dalam penelitian deskriptif. Sebab data-data yang valid dan akurat sangat dibutuhkan dalam memaparkan secara jelas fenomena yang sedang diteliti. Selain itu pengumpulan data juga dibutuhkan untuk mendapatkan informasi berdasarkan fakta yang berguna dalam memperkuat penelitian. Berdasarkan sumber, teknik pengumpulan data dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.⁵⁵ Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara atau bisa juga observasi lapangan. Berbeda dengan data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari berbagai sumber yang tersedia melalui studi kepustakaan seperti buku, artikel, jurnal ilmiah, laporan, situs resmi milik pemerintah dan sebagainya.

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sekunder melalui sebuah studi kepustakaan. Penulis berupaya mencari data-data dari berbagai jurnal, buku, berita, laporan tahunan UNESCO, situs resmi pemerintah Pakistan dan berbagai sumber lain yang berkaitan dengan kesenjangan pendidikan di Pakistan.

1.8.5. Teknik Analisis Data

Secara umum terdapat dua jenis teknik analisis data dalam sebuah penelitian yaitu secara kualitatif dan kuantitatif.⁵⁶ Perbedaan antar kedua penelitian ini adalah penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti masalah yang tidak berkaitan dengan jumlah. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang cenderung digunakan untuk meneliti

⁵⁵ Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung. Hlm. 137.

⁵⁶ Ulber Silalahi, Op.cit. Hlm. 35

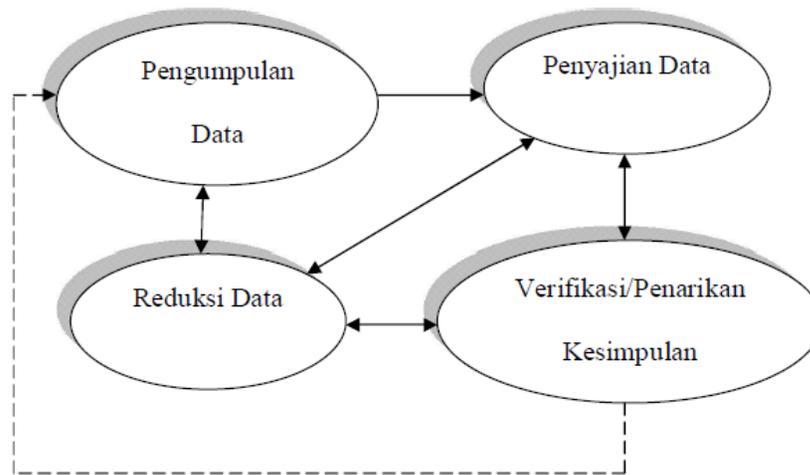
masalah yang berkaitan dengan kuantitas atau jumlah tertentu.⁵⁷ Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif berupa peristiwa nyata dengan menampilkan fakta-fakta dari berbagai sumber yang menggambarkan tentang peranan UNESCO dalam mengentaskan kesenjangan pendidikan di Pakistan. Selain itu peneliti juga akan memaparkan hasil kerja dari UNESCO sebagai bentuk keberhasilan dari upaya pengentasan kesenjangan pendidikan di Pakistan.

Pada analisis data kualitatif terdapat informasi mengenai fenomena yang tidak disimbolkan dengan angka akan tetapi dengan kata-kata yang berorientasi pada makna dan hubungan antar variabel. Menurut Miles dan Hubberman, aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai data yang didapatkan mencapai titik validitas tertentu.⁵⁸ Maka dari itu peneliti juga menggunakan model interaktif dari Miles dan Hubberman untuk menganalisis data hasil penelitian. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, syarat utama dalam analisis ini adalah pencarian data secara terus menerus. Adapun model interaktif milik Miles dan Hubberman adalah sebagai berikut,

⁵⁷ Ulber Silalahi, Op.cit. Hlm. 38

⁵⁸ Sugiyono, Op. Cit. Hlm. 138

Gambar 1.2 Komponen Analisis Data Model Interaktif Miles dan Hubberman



Sumber: Sugiyono. 2009.

Teknik analisis model interaktif ini dimulai dari pengumpulan data melalui berbagai sumber seperti buku, artiker, situs resmi, media cetak dan sebagainya. Kemudian peneliti harus memfokuskan data sesuai dengan tujuan penelitian setelah data terkumpul semua. Pada tahapan ini juga peneliti harus melakukan reduksi data dengan memilah data yang penting dan mendukung penelitian. Setelah data usai direduksi maka saatnya melakukan penyajian data sesuai dengan kebutuhan. Misalnya dalam bentuk bagan, uraian singkat ataupun bentuk lain yang memudahkan pemahaman para pembaca.⁵⁹ Namun sebagian besar penyajian data dalam penelitian kualitatif cenderung berupa teks naratif. Setelah itu penarikan kesimpulan dari penelitian kualitatif. Kesimpulan bersifat fleksibel sehingga dapat berubah sesuai dengan data yang diperoleh selama penelitian.⁶⁰

⁵⁹ Sugiyono, Op. Cit. Hlm. 139

⁶⁰ Ibid.

1.9. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri atas 4 (empat) bab utama. Empat bab utama tersebut tersusun secara berurutan sebagai berikut:

1. **BAB I** merupakan metodologi penulisan yang tersusun atas latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, landasan teori, hipotesis, metodologi penelitian yang terdiri dari definisi konseptual dan operasional, tipe penelitian, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta sistematika penulisan.
2. **BAB II** berisi penjabaran mengenai kesenjangan pendidikan dan analisis aktor UNESCO. Dimulai dari definisi kesenjangan pendidikan, factor kemunculan kesenjangan pendidikan serta analisis aktor dan peran UNESCO secara keseluruhan.
3. **BAB III** berisi hasil dan pembahasan mengenai upaya pemerintah Pakistan dan UNESCO dalam mengatasi kesenjangan pendidikan di Pakistan yang meliputi upaya pemerintah Pakistan, kemitraan Pakistan dan UNESCO, upaya UNESCO, faktor penghambat yang dihadapi UNESCO dan indikasi keberhasilan UNESCO.
4. **BAB IV** berisi penarikan kesimpulan-kesimpulan yang diawali dengan proses analisa dari data-data yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya untuk menjawab rumusan masalah terkait peranan UNESCO dalam mengatasi kesenjangan pendidikan di Pakistan tahun 2015 sampai dengan 2018.